

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Untuk memperkuat fungsi organisasi pada Pengadilan Agama Watampone, dibutuhkan SDM yang kompeten dan profesional, terutama untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia itu sendiri menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi Pengadilan Agama Watampone perlu diperkuat dan ditingkatkan. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum, khususnya peradilan agama, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Watampone merupakan hal yang sangat penting.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A pada tahun 2017 berjumlah 41 (empat puluh satu) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Matrik Sumber Daya Manusia (SDM)

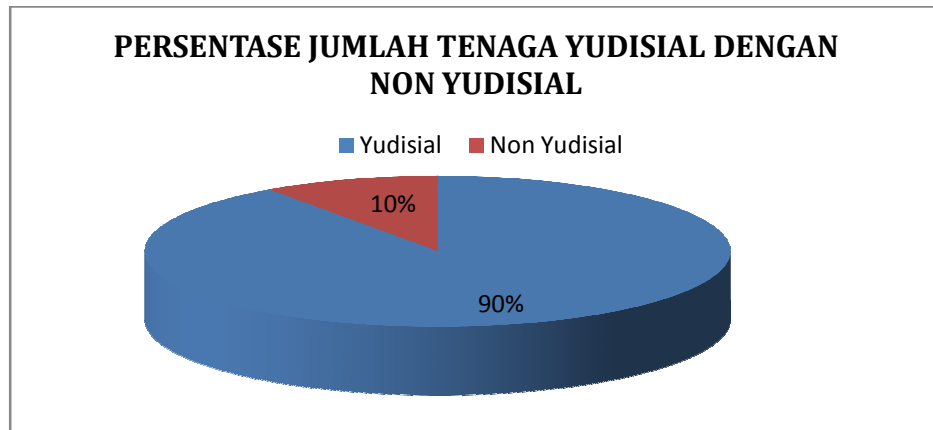
No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Pandi, S.H., M.H.	Ketua	
2	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.	Hakim	
4	Dra. Hj. St. Masdanah	Hakim	
5	Drs. H. Abd. Samad	Hakim	
6	Drs. Adaming, S.H., M.H.	Hakim	
7	Dra. Hj. Nurmiati, M.H.	Hakim	
8	Drs. Makmur, M.H.	Hakim	
9	Drs. Tayeb, S.H., M.H.	Hakim	
10	Dra. Siarah, S.H., M.H.	Hakim	
11	Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.	Hakim	
12	Dra. Hj. Husniwati	Hakim	
13	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	Hakim	
14	Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, M.H.	Hakim	
15	Drs. H. Ramly Kamil, M.H.	Hakim	

16	Drs.H. Awaluddin, S.H., M.H.	Hakim	
17	Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.	Hakim	
18	Kamaluddin, S.H., M.H.	Panitera	
19	Dra. Rosdiana	Wakil Panitera	
20	Dra. Muliati, M.Sy.	Panitera Muda Permohonan	
21	Dra. Hj. Munirah	Panitera Muda Gugatan	
22	Drs. Jamaluddin	Panitera Muda Hukum	
23	Dra. Hunaena	Panitera Pengganti	
24	Dra. Hj. Rosmini	Panitera Pengganti	
25	Drs. Rustan, S.H.	Panitera Pengganti	
26	Dra. Wakiah	Panitera Pengganti	
27	Dra. St. Naisyah	Panitera Pengganti	
28	Dra. Nuraeni	Panitera Pengganti	
29	Bintang, S.H.	Panitera Pengganti	
30	Siti Jamilah, S.H.	Panitera Pengganti	
31	Haris, S.HI., M.Sy.	Panitera Pengganti	
32	Dra. Samsang	Panitera Pengganti	
33	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si.	Sekretaris	
34	Nurhidayah, S.Ag.,M.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
35	Hj. Asmah, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.	
36	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
37	Muhammad Suardi, S.H.	Juru Sita	
38	Muhammad Syahrani, S.H.	Juru Sita	
39	Ridmajayanti, S.Sos.	Juru Sita	
40	Heriawati	Juru Sita Pengganti	
41	Agustiawati, S.H.	Staf Panitera Muda Gugatan	

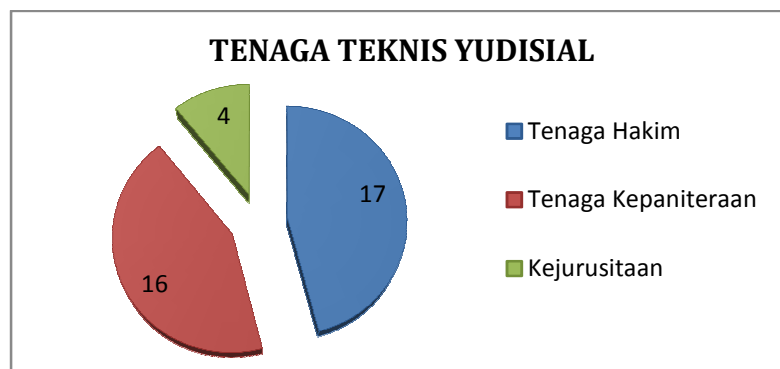
Dalam periode tahun 2017, sesuai perkembangan struktur organisasi Peradilan Agama, keadaan SDM teknis yudisial dan non yudisial di Pengadilan Agama Watampone adalah terdapat 17 orang Hakim, 16 orang Kepaniteraan dan

4 orang Juru Sita / Juru Sita Pengganti serta Kesekretariatan sebanyak 4 orang. Adapun perkembangan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2017 dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Gambar 3.1
Diagram Persentase Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial



Gambar 3.2
Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial



1. Mutasi

Mutasi merupakan suatu perubahan posisi, jabatan tempat maupun pekerjaan yang dilakukan, baik secara horisontal maupun vertikal dalam suatu organisasi.

Upaya ini dilakukan Mahkamah Agung terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada Pengadilan Agama Watampone yang menjadi bagian dari fungsi pengembangan sumber daya manusia karena tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, mutasi ini juga menjadi stimulus bagi Sumber Daya

Manusia untuk meningkatkan kinerjanya dan bagi Pengadilan Agama Watampone berguna untuk menciptakan keseimbangan antara SDM dengan komposisi pekerjaan / jabatan.

Perkembangan mutasi tahun 2017 pada Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Mutasi Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Drs. H. Pandi, S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Denpasar Kelas I A	Ketua PA Watampone Kelas I A
2	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Palu Kelas I A	Wakil Ketua PA Watampone Kelas I A
3	Drs. Hasbi, M.H.	Ketua PA Watampone Kelas I A	Ketua PA Polewali Kelas I B
4	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Watampone Kelas I A	Wakil Ketua PA Pinrang Kelas I B
5	Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.	Ketua PA Ternate Kelas I B	Hakim PA Watampone Kelas I A
6	Drs. Tayeb, S.H., M.H.	Ketua PA Gianyar Kelas II	Hakim PA Watampone Kelas I A
7	Drs. Adaming, S.H., M.H.	Ketua PA Mamuju Kelas II	Hakim PA Watampone Kelas I A
8	Dra. Hj. St. Masdanah	Hakim PA Gorontalo Kelas I B	Hakim PA Watampone Kelas I A
9	Haris, S.H.i, M.Sy.	Panitera Muda Permohonan PA Bulukumba Klas II	Panitera Pengganti PA Watampone Kelas I A

2. Promosi

Promosi merupakan suatu perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memiliki status yang lebih tinggi. Landasan para pengambil kebijakan memberi promosi kepada pegawai tertentu adalah kepercayaan terhadap kejujuran, kemampuan / kompetensi dan kecakapan pegawai tersebut. Tujuan Mahkamah Agung memberikan promosi pada SDM

Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar sehingga dapat menimbulkan kepuasan, kebanggaan pribadi dan status sosial yang semakin tinggi. Selain itu untuk memotivasi pegawai yang menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisikannya promosi tersebut.

Tabel 3.3
Daftar Promosi Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Drs. H. Pandi, S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Denpasar Kelas I A	Ketua PA Watampone Kelas I A
2	Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.	Ketua PA Ternate Kelas I B	Hakim PA Watampone Kelas I A
3	Drs. Tayeb, S.H., M.H.	Ketua PA Gianyar Kelas II	Hakim PA Watampone Kelas I A
4	Drs. Adaming, S.H., M.H.	Ketua PA Mamuju Kelas II	Hakim PA Watampone Kelas I A
5	Dra. Hj. St. Masdanah	Hakim PA Gorontalo Kelas I B	Hakim PA Watampone Kelas I A
6	Haris, S.H.i, M.Sy.	Panitera Muda Permohonan PA Bulukumba Klas II	Panitera Pengganti PA Watampone Kelas I A

3. Pensiun

Pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Pada tahun 2017 hanya 1 (satu) pegawai yang memasuki usia pensiun, atas nama Hj. Sumrah, S.H. dengan jabatan terakhir sebagai Hakim, yang memasuki masa Purnabakti pada tanggal 1 Desember 2017.

4. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Diklat merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Tujuan dilaksanakannya program diklat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan Nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk PNS atau aparatur agar dicapainya kompetensi tertentu.

Tabel 3.4
Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat pada Tahun 2017

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Lama Diklat	Penyelenggara Diklat
1	H. A. Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	19 Juli s/d 25 November 2017	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI
2	Nurhidayah, S.Ag.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	23 Agustus s/d 18 Desember 2017	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara

B. Penyelesaian Perkara

Tugas pokok dan fungsi dari Peradilan Agama Watampone sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.

Tabel 3.5
Matrik Keadaan Perkara pada Wialayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Cerai Gugat	878	690	188	
2	Cerai Talak	349	300	49	
3	Harta Bersama	6	2	4	
4	Kewarisan	11	7	4	
5	Izin Poligami	2	2	0	
6	Penguasaan Anak	1	1	0	
7	Pengesahan/Itsbat Nikah	950	941	9	
8	Dispensasi Kawin	154	151	3	
9	Wali Adhal	6	5	1	
10	Hibah	1	0	1	
11	Perwalian	3	2	1	
12	Penetapan Ahli Waris	47	46	1	
	TOTAL	2408	2147	261	

Berikut ini merupakan gambaran tentang penyelesaian perkara :

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

a. Perkara Permohonan (Volunter)

Di bawah ini disajikan data Sisa Perkara Permohonan (Volunter) pada tahun 2016 sebanyak 35 perkara, data rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Data Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1	Pengesahan/Itsbat Nikah	22
2.	Dispensasi Kawin	9

3.	Penetapan Ahli Waris	4
Jumlah		35

b. Perkara Gugatan (Contentius)

Sisa perkara gugatan pada tahun 2016 sebanyak 261 perkara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	190
2.	Cerai Gugat	67
3.	Kewarisan	4
Jumlah		261

Berdasarkan tabel 3.6 dan tabel 3.7, maka jumlah sisa perkara tahun 2016 yang diputus pada tahun 2017 adalah 296 perkara (35 + 261).

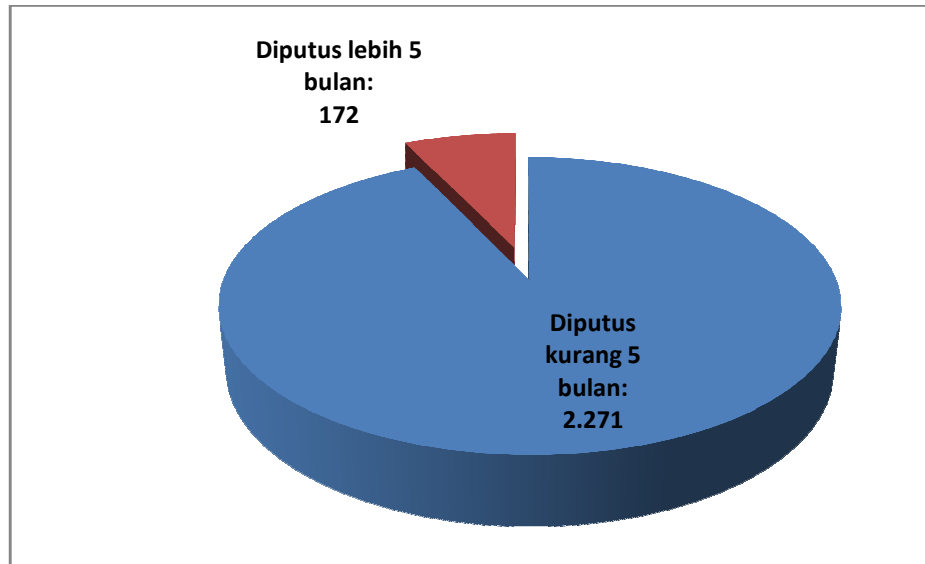
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Tabel 3.8
Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

No	Bulan	Jumlah Perkara	
		Diputus yang kurang dari 5 bulan	Diputus yang lebih dari 5 bulan
1	Januari	119	8
2	Februari	127	13
3	Maret	163	19
4	April	323	11
5	Mei	279	8
6	Juni	71	17
7	Juli	325	31
8	Agustus	321	17
9	September	111	15
10	Oktober	141	10
11	Nopember	143	10
12	Desember	148	13
Total		2.271	172

Berdasarkan tabel 3.8, maka jumlah perkara yang diputus tepat waktu (kurang dari 5 bulan) pada tahun 2017 sebanyak 2.271 perkara.

Gambar 3.3
Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara



3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Rekapitulasi amar putusan Banding tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Data Rekap Amar Putusan Banding Tahun 2017

N o	Nomor Perkara Tk I Yang Diajukan Banding	Putusan Tk I Yang Dikuatkan Tk Banding	Putusan Tk I Yang Dibatalkan Tk Banding	Putusan Tk I Yang Tidak Dapat Diterima Tk Banding	Keterangan
1.	331/Pdt.G/2016/PA.Wtp	-	√	-	-
2.	1281/Pdt.G/2016/PA.Wtp	√	-	-	-
3.	182/Pdt.G/2017/PA.Wtp	√	-	-	-
4.	468/Pdt.G/2017/PA.Wtp	√	-	-	-

5.	214/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Cabut sebelum penyerahan Memori Banding
6.	1164/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Cabut setelah Penyerahan Memori Banding
7.	219/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Masih dalam proses
8.	663/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Masih dalam proses
Jumlah		3	1	-	

Berdasarkan tabel 3.9, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) perkara.

Tabel 3.10
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	263/Pdt.G/2016/PA.Wtp	8 Mei 2017
2	331/Pdt.G/2016/PA.Wtp	6 Juni 2017

Berdasarkan tabel 3.10, perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) perkara.

Tabel 3.11
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	443/Pdt.G/2016/PA.Wtp	10 Januari 2017
2	19/Pdt.G/2014/PA.Wtp	5 April 2017

Berdasarkan tabel 3.11, perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) perkara.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara, dan Pengadilan Agama

Watampone tahun 2017 telah melaksanakan proses mediasi. Realisasi pelaksanaan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Data Pelaksanaan Mediasi

Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi
	Gagal	Berhasil	Tidak Berhasil	
185	-	1	172	12

Berdasarkan tabel 3.12, perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2017 hanya 1 (satu) perkara.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Kendaraan Dinas

Ada dua jenis kendaraan dinas Pengadilan Agama Watampone, yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Total nilai aset kendaraan dinas jika dinilai dengan hitungan rupiah pada tahun 2017 adalah **Rp 455.024.828** (*Empat ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

Tabel 3.13
Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Kijang Innova	2007		√		
2.	Kijang Avanza	2011	√			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Suzuki Shogun Racing FD 125 XRM	2006		√		
2.	Suzuki Tunder EN 125	2006			√	
3.	Yamaha Jupiter MX 286	2007	√			
4.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
5.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
6.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
7.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			

8.	Suzuki Shogun R FL 125 SD	2009	√			
----	---------------------------	------	---	--	--	--

2. Rumah Dinas

Rumah dinas Pengadilan Agama Watampone yang berdiri di atas tanah seluas 1.308 M² merupakan gedung / kantor lama yang telah dilalih fungsikan menjadi rumah dinas.

Tabel 3.14
Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1			√	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1			√	
3.	Rumah Dinas Hakim	1			√	

Tanah Bangunan Rumdis seluas	1,308 M2	Rp. 460.000.000
Rumah Dinas	783 M2	Rp. 545.674.000
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp. 1.005.674.000

Total nilai aset rumah dinas (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 1.005.674.000,-** (Satu miliar lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

3. Sarana / Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Gedung Pengadilan Agama Watampone yang sekarang ini diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2008 oleh DR. H.A. Harifin Tumpa, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI saat itu. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.340 M² dan telah resmi ditempati sejak peresmian.

Tanah Bangunan Kantor seluas	3,340 M2	Rp. 1.122.240.000
Gedung dan Bangunan Kantor	1,768 M2	Rp. 3.940.664.000
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp. 5.062.904.000

Total nilai aset sarana / prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 5.062.904.000,-** (*Lima miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah*).

Rincian jumlah sarana dan prasarana Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Matrik Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Sarana / Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Wakil Panitera	1	
10	Ruang Kesekretariatan	1	
11	Ruang Bendahara	1	
12	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
13	Ruang Pusat Pelayanan Perkara	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Juru Sita	1	
18	Ruang Arsip Perkara	1	
19	Dapur / pantri	1	
20	Toilet Umum	4	
21	Ruang Tunggu Persidangan	1	
22	Ruang / Area Merokok	1	
23	Ruang Arena Bermain Anak	1	
24	Ruang Posbakum	1	
25	Ruang TI	1	
26	Pos Keamanan	2	
27	Mushollah	1	
28	Tempat Parkiran	2	
29	Kantin	1	

	Jumlah	38	
II	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Lemari Besi/Metal	56	
2	Lemari kayu	6	
3	Rak kayu	2	
4	Brandkas	1	
5	Tabung Pemadam	5	
6	Papan Visual	5	
7	Mesin Absepsi	1	
8	Stempel timbul bulat	1	
9	Perkakas Kantor Lainnya	1	
10	Meja kerja kayu	65	10 rusak berat
11	Kursi Besi/Metal	190	15 rusak berat
12	Kursi Kayu	12	
13	Sice	4	
14	Meja Rapat	2	
15	Tempat Tidur Besi	1	Rusak berat
16	Meja Telpon	1	
17	Meja Resepsionis	2	
18	Sketsel	2	
19	Kursi Tunggu	7	
20	Mesin Pemotong Rumput	1	
21	Lemari Es	1	
22	A.C. Split	21	
23	Kipas Angin	1	
24	Kompor Gas	1	
25	Tabung Gas	1	
26	Televisi	5	
27	Sound System	1	
28	Lambang Garuda Pancasila	2	
29	Gambar Presiden/Wapres	2	
30	Tiang Bendera	6	
31	Kaca Hias	6	
32	Mimbar/Podium	1	
33	Palu Sidang	2	
34	Lambang Instansi	1	
35	Gordyn/Kray	1	Rusak berat
36	Asbak Tinggi	4	
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	
38	Kamera Digital	1	Rusak berat
39	Telephon (PABX)	1	
40	Pesawat Telepon	1	

41	Facsimile	1	
42	Genset	1	
43	P.C. Unit	15	5 rusak berat
44	Laptop	12	3 rusak berat
45	Printer	16	6 rusak berat
46	Scanner	1	
47	Server	1	
48	Router	3	
49	Rak Server	1	
50	Kabel UTP	3	
51	Wireless Access Point	2	
52	Switch	6	
	Jumlah	498	

Sarana / prasarana fasilitas kantor secara keseluruhan berjumlah 498 buah dengan rincian 456 buah dalam kondisi baik, 0 buah rusak ringan dan 42 buah rusak berat, dan jika diukur dengan nilai mata uang rupiah, maka total aset sarana / prasarana fasilitas kantor Pengadilan Agama Watampone adalah senilai **Rp 1.836.086.028** (*Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah*).

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi Anggaran untuk :

- 1) Teknologi Informasi berupa anti virus sebanyak 1 Sistem.
- 2) Alat Pengolah Data dan Komunikasi :
 - Komputer PC sebanyak 1 unit
 - Printer sebanyak 1 unit
- 3) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran :
 - Kursi Hakim sebanyak 10 unit
 - Meja Hakim sebanyak 10 unit
 - AC Split 2 PK sebanyak 2 unit
 - AC Split 1 PK sebanyak 3 unit
- 4) Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP :
 - Lap Top sebanyak 1 unit

- Komputer PC sebanyak 3 unit
- Printer sebanyak 3 unit
- TV LED sebanyak 1 unit
- UPS sebanyak 2 unit

b. Pemeliharaan

DIPA Tahun 2017 Pengadilan Agama Watampone mendapat anggaran untuk belanja Biaya Pemeliharaan :

- 1) Peralatan dan mesin yang meliputi :Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Komputer, AC, Inventaris, Lap Top, Printer.
- 2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, meliputi : Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman.
- 3) Perawatan Jaringan.

Total Aset Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 dalam hitungan rupiah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah
Tahun 2017

No	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	1.582.240.000,-
2	Peralatan Dan Mesin	1.823.896.028,-
3	Gedung dan Bangunan	4.642.914.000,-
4	Jaringan	19.988.100,-
5	Aset Tetap Lainnya	14.997.470,-
6	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.372.115.428,-)
7	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(929.812.780,-)
8	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(999.404,-)
9	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0,-
10	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0,-
11	Barang Komsumsi	103.400,-
Jumlah		5.781.211.386,-

Dari tabel 3.16 terlihat bahwa total aset Negara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2017 setelah penyusutan adalah **Rp 5.781.211.386,-**

(Lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

D. Pengelolaan Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: SP DIPA-005.01.2.307509/2017 tanggal 07 Desember 2016 sejumlah **Rp 8.301.057.000,-** *(Delapan milyar tiga ratus satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah).*

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2017 tanggal 07 Desember 2016 sejumlah **Rp 146.660.000,-** *(Seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).*

Selama tahun anggaran 2017 telah dilakukan revisi DIPA 307509 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 25 April 2017 tentang Perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan, 1 satker dan Perubahan halaman III DIPA.
- 4) Revisi IV tanggal 30 November 2017 tentang Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker dalam 1 KanWil, serta Perubahan halaman III DIPA.

Selama tahun anggaran 2017 telah dilakukan revisi DIPA 309076 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 25 April 2017 tentang Perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 17 Oktober 2017 tentang Perubahan halaman III DIPA.

Program – program pada Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017 :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Belanja Pegawai

- Pagu Rp 7.295.610.000,- (setelah revisi)

- Realisasi Rp 7.293.120.670,- (99,97 %)
- Sisa Rp 2.489.330,- (0,03 %)

2) Belanja Barang

- Pagu Rp 775.447.000,- (setelah revisi)
- Realisasi Rp 747.574.499,- (96,41 %)
- Sisa Rp 27.872.501,- (3,59 %)

Outcome dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ini adalah tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada kantor Pengadilan Agama Watampone.

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor Pengadilan Agama Watampone sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini terdiri dari Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadilan Agama Watampone selama 12 bulan, meliputi 3 Komponen sebagai berikut :

- 1) Komponen 051 (Dukungan Manajemen Pengadilan) :
 - a) Koordinasi/konsultasi/pembinaan/pengawasan/sosialisasi
 - b) Pertemuan/Jamuan/delegasi
- 2) Komponen 001 (Gaji dan Tunjangan)
- 3) Komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor):
 - a) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran:
 1. Belanja Keperluan Perkantoran
 - Jasa Satpam, Supir dan Pramubakti;
 - Langganan Surat Kabar;
 - Langganan Air Galon.
 2. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
 - Biaya keperluan sehari-hari perkantoran
 - b) Langganan Daya dan Jasa:
 1. Belanja Keperluan Perkantoran

- Langganan Internet
- Langganan Web Hosting
- 2. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
 - Biaya Pengiriman Surat Dinas
- 3. Langganan Listrik
- 4. Langganan Telepon
- 5. Langganan Air (PDAM)
- c) Pemeliharaan Kantor:
 1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 2. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
 - Pemeliharaan PC
 - Pemeliharaan Laptop
 - Pemeliharaan AC Split
 - Pemeliharaan Genset
 - Pemeliharaan Jaringan
 - Pemeliharaan Inventaris Kantor
- d) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor:
 1. Honor Operasional Satuan Kerja;
 2. Belanja Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Sopir dan Pramubakti serta Foto Copy, Jilid dan Cek.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Pagu	Rp 230.000.000,-	
- Realisasi	Rp 229.877.000,-	(99,95 %)
- Sisa	Rp 123.000,-	(0,05 %)

Program dukungan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung ini outcomenya adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya. Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah pengadaan sarana prasarana di

lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan.

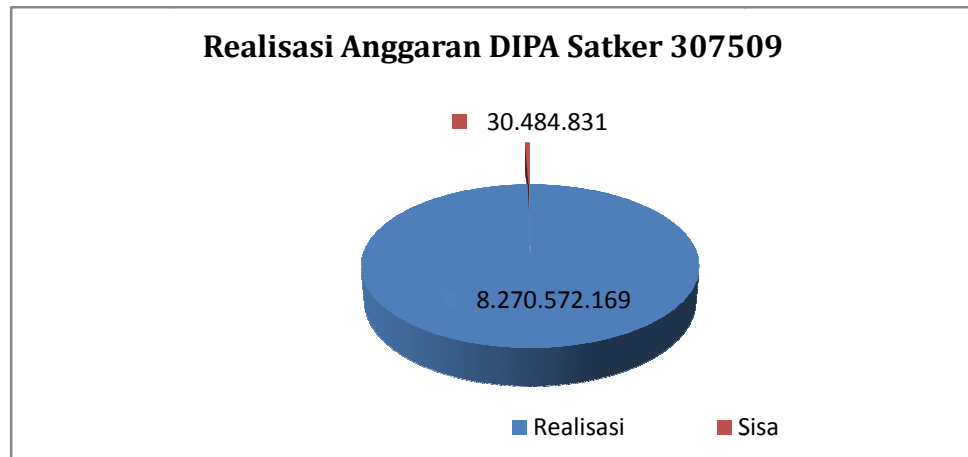
Komponen kegiatan ini meliputi :

- a) Pengadaan Anti Virus sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) dengan realisasi Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*).
- b) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp 105.000.000,- (*Seratus lima juta rupiah*) dengan realisasi Rp 104.900.000,- (*Seratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
 - PC. Unit (4 unit) @ Rp.9.975.000,- = Rp.39.900.000,-
 - Lap Top (1 unit) @ Rp.15.000.000,- = Rp.15.000.000,-
 - Printer (4 unit) @ Rp.2.500.000,- = Rp.10.000.000,-
 - TV LED (1 unit) @ Rp.20.000.000,- = Rp.20.000.000,-
 - UPS (2 unit) @ Rp.10.000.000,- = Rp.20.000.000,-
- c) Peralatan dan Fasilitas Kantor sebesar Rp. Rp 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*), dengan realisasi Rp 119.977.000,- (*Seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
 - Kursi Hakim (10 buah) @Rp.3.000.000,- =Rp.30.000.000,-
 - Meja Hakim (10 buah) @Rp.5.100.000,- =Rp.51.000.000,-
 - AC 2 PK (2 unit) @ Rp.6.600.000,- = Rp.13.200.000,-
 - AC 1 PK (3 unit) @ Rp.4.290.000,- = Rp.12.870.000,-

Rekapitulasi pagu Satker 307509 secara keseluruhan adalah:

PAGU	Rp. 8.301.057.000,-
REALISASI	Rp. 8.270.572.169,- (99,63 %)
SISA (PENGEMBALIAN)	Rp. 30.484.831,- (0,37 %)

Gambar 3.4
Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 307509



Pelaksanaan anggaran tahun 2017 DIPA 307509 secara keseluruhan belum berjalan sesuai dengan rencana, dimana pencapaian realisasi hanya mencapai 99,63%. Hasil ini diperoleh dari belanja pegawai terealisasi sebesar 99,97%. Pencapaian realisasi belanja barang mencapai 99,62% dan realisasi belanja modal mencapai 99,95%, sehingga ada pengembalian ke negara sebesar Rp 30.484.831.- Hal tersebut disebabkan tidak terserapnya anggaran belanja barang (Jasa Listrik, Telepon dan Air) secara maksimal.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan (Belanja Barang DIPA BADILAG / 309076)

Program peningkatan manajemen peradilan ini hasilnya adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama Watampone.

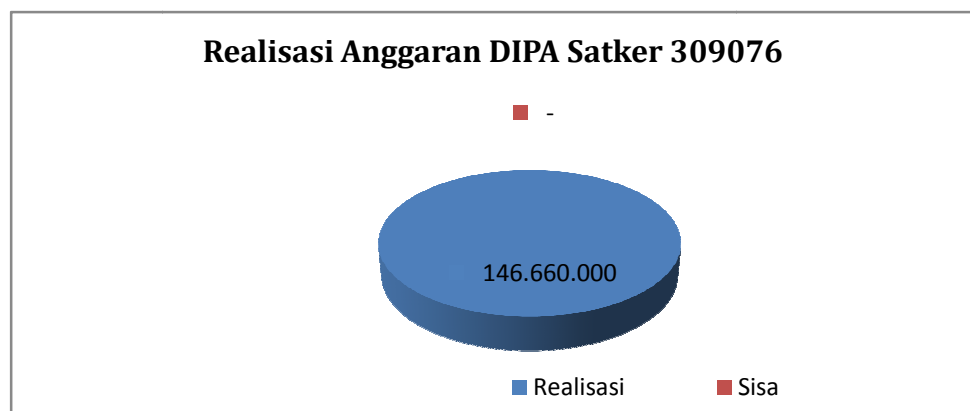
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah penyelesaian administrasi perkara, operasional pos pelayanan hukum dan pelaksanaan sidang pelayanan terpadu di luar kantor Pengadilan Agama Watampone.

Tabel 3.17
Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2017

No	Sub Output	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Bantuan Pembebasan	Rp 23.460.000	Rp 23.460.000	Rp 0

	Biaya Perkara (Prodeo)			
2	Biaya Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan	Rp 71.200.000	Rp 71.200.000	Rp 0
3	Pos Bantuan Hukum	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	Rp 0
	Total	Rp 146.660.000	Rp 146.660.000	Rp 0

Gambar 3.5
Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076



Adapun Belanja Barang dari DIPA 04 Badilag berhasil mencapai realisasi sebesar 100%, dimana penyerapan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo melebihi target (60 perkara), yaitu 69 perkara. Kegiatan sidang keliling / Pelayanan Terpadu yang ditargetkan pada DIPA 04 sebanyak 16 kegiatan berhasil terlaksana semua serta Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum (100%).

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat menuntut kita yang mempunyai tupoksi pelayanan masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Pendukung teknologi yang harus tersedia demi terjaminnya pelaksanaan tupoksi terlaksana yaitu adanya perangkat keras dan perangkat lunak. Tuntutan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut dan memacu Pengadilan Agama Watampone untuk mengembangkan teknologi informasi.

Berikut merupakan dukungan teknologi informasi yang terdapat pada Pengadilan Agama Watampone :

a. Perangkat Keras

Dalam rangka menunjang kemampuan teknologi informasi di Pengadilan Agama Watampone, maka sarana dan prasarana yang menjadi perangkat keras yang tersedia adalah :

- 1) Komputer (PC) sebanyak 15 unit, tetapi 5 unit rusak berat
- 2) Laptop sebanyak 12 unit, tetapi 3 unit rusak berat
- 3) Printer sebanyak 16 unit, tetapi 6 unit rusak berat
- 4) Server sebanyak 1 unit
- 5) Switch sebanyak 6 unit
- 6) Router sebanyak 3 unit
- 7) Wireless access point sebanyak 2 unit

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang tersedia di Pengadilan Agama Watampone antara lain :

- 1) Sistem operasi yang terdapat dalam PC dan laptop menggunakan sistem operasi Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Sedangkan untuk server menggunakan Windows Server 2008 original.
- 2) Aplikasi Standar yang tersedia antara lain, Microsoft Office 2007, PDF, Nitro PDF, Winrar/ZIP, PDF reader, Photoshop, anti virus Smadav dan anti virus Kaspersky. Sedangkan untuk server menggunakan anti virus Microsoft Security Essential
- 3) Aplikasi Administrasi Keuangan terdiri dari :
 - Aplikasi SAS
 - Aplikasi SAIBA
 - Aplikasi Komdanas (www.mahkamahagung.go.id)
 - Aplikasi OM-SPAN
 - Aplikasi SIMPONI
 - Aplikasi SIMARI
- 4) Aplikasi Adminstrasi Umum terdiri dari :

- Aplikasi SIMAK-BMN
 - Aplikasi SIMAN
 - Aplikasi SIMANTAP
 - Aplikasi Persediaan
- 5) Aplikasi Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
- Aplikasi SIMPEG (www.simpeg.badilag.net/E-doc)
 - Aplikasi SIKEP (www.sikep.mahkamahagung.go.id)
 - Aplikasi Komdanas (www.komdanas.mahkamahagung.go.id)
- 6) Aplikasi Administrasi Perkara terdiri dari :
- Aplikasi SIADPA Plus (Sistem Informasi Administrasi Perkara)
 - Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
- 7) Aplikasi Administrasi Perencanaan terdiri dari :
- Aplikasi RKA-KL Offline/desktop
 - Aplikasi RKA-KL Online
 - Aplikasi SIMAN
 - Aplikasi PP 39 Bappenas (www.e-monev.bappenas.go.id)
 - Aplikasi e-monev (www.monev.anggaran.depkeu.go.id)
 - Aplikasi SIRUP

1. Publikasi Perkara (*One Day One Publish*)

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan. SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara. Melalui aplikasi ini, Pengadilan Agama Watampone dapat menyajikan informasi tentang progres dari suatu perkara. Misalnya suatu perkara masih berada di tahap pendaftaran perkara, sidang pertama termasuk lama proses kasus tersebut berjalan. Masyarakat dapat melihat langsung di website dan mencari informasi perkara yang diinginkan.

Dengan diterapkannya aplikasi SIPP, maka publikasi perkara diharapkan dapat dilaksanakan secara *one day publish* yaitu perkara yang diproses pada hari itu dapat langsung dipublikasikan pada hari tersebut.

F. Regulasi Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai bidang, maka tahun 2017 Kantor Pengadilan Agama Watampone mengeluarkan beberapa regulasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Regulasi PA Watampone Tahun 2017

No	Nomor Surat Keputusan	Nama Regulasi	Tanggal
1	W20-A2/001/KU.01/SK/I/17	SK. Penunjukan Bendahara Pengeluaran	03 Januari 2017
2	W20-A2/002/KU.01/SK/I/2017	SK. PPK	03 Januari 2017
3	W20-a2/003/OT.I/SK/I/2017	SK. Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama	03 Januari 2017
4	W20-A2/003a/Pl.00/I/2017	SK. Peraturan Penyimpanan BMN	03 Januari 2017
5	W20-A2/004/OT.01.2/I/2017	SK. Tim Penyusun LKJIP	03 Januari 2017
6	W20-A2/004a/KU.00/I/2017	SK. Pengelola Bendahara Penerima	03 Januari 2017
7	W20-A2/005/OT.01/SK/I/2017	SK. Reviu Rencana strategis	03 Januari 2017
8	W20-A2/005a/HK.05/SK/I/2017	SK. Standar Layanan Informasi	03 Januari 2017
9	W20-A2/006/Hk.05/SK/I/2017	SK. Panjar Biaya Perkara	03 Januari 2017
10	W20-A2/006a/HK.05/SK/I/2017	SK. Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan PosBaKum	03 Januari 2017
11	W20-A2/006b/HK.05/SK/I/2017	SK. Petugas Meja Informasi dan Pengaduan	03 Januari 2017
12	W20-A2/007/HK.05/SK/I/2017	SK. Penunjukan Jurusita	03 Januari 2017
13	W20-A2/007a/Hk.05/SK/I/2017	SK. Melaksanakan Sidang Diluar Gedung	03 Januari 2017
14	W20-A2/007b/Hk.05/SK/I/2017	SK. Penunjukan Tim Pengelola IT	03 Januari 2017
15	W20-A2/008/HK.05/SK/I/2017	SK. Pengelola ATK	03 Januari 2017
16	W20-A2/008a/HK.05/SK/I/2017	SK. Biaya ATK Perkara dan Biaya Penyelesaian Perkara	03 Januari 2017
17	W20-A2/008b/HK.05/SK/I/2017	SK. Melaksanakan Sidang di Lokasi yang Telah Ditentukan	03 Januari 2017
18	W20-	SK. Penunjukan Tim Pengelola	03 Januari 2017

	A2/008c/HK.05/SK/I/2017	Website	
19	W20-A2/009/HK.05/SK/I/2017	SK. Hakim Mediator	03 Januari 2017
20	W20-A2/009a/HK.05/SK/I/2017	SK. Biaya Perjalanan Jurusa/Jurusa Pengganti	03 Januari 2017
21	W20-A2/009b/HK.05/SK/I/2017	SK. Perlengkapan Persidangan	03 Januari 2017
22	W20-A2/009c/HK.05/SK/I/2017	SK. Pemanfaatan Antrian Sidang	03 Januari 2017
23	W20-A2/010/KP.002/SK/I/2017	SK. Honorer DIPA 2017	03 Januari 2017
24	W20-A2/010a/Kp.002/SK/I/2017	SK. Kontrak Kerja	03 Januari 2017
25	W20-A2/010b/KP.002/SK/I/2017	SK. Penerimaan Bukti Setiap Penyerahan Dokumen di Pengadilan	03 Januari 2017
26	W20-A2/011/Hk.05/SK/I/2017	SK. Susunan Majelis Hakim	03 Januari 2017
27	W20-A2/011a/KP.002/I/2017	SK. Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
28	W20-A2/011b/KP.002/I/2017	SK. Buku Bantu dan BKU	03 Januari 2017
29	W20-A2/012/KP.04.6/SK/I/2017	SK. Baperjakat	03 Januari 2017
30	W20-A2/012a/KP.002/SK/I/2017	SK.Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
31	W20-A2/013/HM.00/SK/I/2017	SK. Humas	03 Januari 2017
32	W20-A2/013a/Kp.002/SK/I/2017	SK. Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
33	W20-A2/013b/HK.05/SK/I/2017	SK. Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	03 Januari 2017
34	W20-A2/014/OT.03.1/SK/I/2017	SK. Meja Informasi dan Pengaduan	03 Januari 2017
35	W20-A2/014a/HK.05/SK/I/2017	SK. Susunan Panitera Pengganti	03 Januari 2017
36	W20-A2/014b/Hk.05/SK/I/2017	SK. Ppengiriman Petikan	03 Januari 2017
37	W20-A2/015/HK.05/SK/I/2017	SK. Penunjukan Petugas Pengaduan	03 Januari 2017
38	W20-A2/016/HK.05/SK/I/2017	SK. Sidang Keliling	03 Januari 2017
39	W20-A2/016a/OT.01.3/SK/I/2017	SK. Penunjukan Petugas Meja I,II,III	03 Januari 2017
40	W20-A2/016b/HK.05.SK/I/2017	SK. SOP Pengaduan	03 Januari 2017
41	W20-A2/016c/HK.05/SK/I/2017	SK.Penunjukan yang Menangani Pengaduan	03 Januari 2017
42	W20-A2/017/KP.001/SK/I/2017	SK. Honor Sukarela	03 Januari 2017
43	W20-A2/017a/Kp.002/SK/I/2017	SK .Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
44	W20-	SK. Honor Sukarela	03 Januari 2017

	A2/018/Kp.00/SK/I/2017		
45	W20-A2/018a/Kp.002/SK/I/2017	SK. Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
46	W20-A2/018b/HK.05/SK/I/2017	SK. Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Perkara	03 Januari 2017
47	W20-A2/019/Kp.00/SK/I/2017	SK. Honor Sukarela	03 Januari 2017
48	W20-A2/019a/Kp.002/SK/I/2017	SK. Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
49	W20-A2/020/Kp.00/SK/I/217	SK. Honor Sukarela	03 Januari 2017
50	W20-A2/020a/Kp.002/SK/I/2017	SK. Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
51	W20-A2/021/Kp.00/SK/I/2017	SK. Honor Sukarela	03 Januari 2017
52	W20-A2/021a/Kp.002/SK/I/2017	SK. Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
53	W20-A2/022/OT.01.3/SK/I/2017	SK. Penunjukan Pejabat PPID	03 Januari 2017
54	W20-A2/022a/Kp.002/SK/I/2017	SK. Perjanjian Kontrak Kerja	03 Januari 2017
55	W20-A2/023/Ps.00/SK/I/2017	SK. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	03 Januari 2017
56	W20-A2/023a/HK.05/SK/I/2017	SK. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	05 Januari 2017
57	W20-A2/023b/Kp.00/SK/I/2017	SK. Internal	05 Januari 2017
58	W20-A2/023c/OT.00/SK/I/20176	SK. Pengelola Arsip	05 Januari 2017
59	W20-A2/024/HK.05/SK/I/2017	SK Penunjiukan Majelis Hakim	19 Januari 2017
60	W20-A2/024a/HM.00/SK/I/2017	SK. Panitia Kegiatan Bedah Berkas Wilayah V	27 Januari 2017
61	W20-A2/025/Pl.04/SK/I/2017	SK. Penunjukan Kendaraan	27 Januari 2017
62	W20-A2/025a/KP.01.2/SK/I/2017	SK. Uraian Tugas	27 Januari 2017
63	W20-A2/026/Pl.04/SK/I/2017	SK. Pengelola DIPA	27 Januari 2017
64	W20-A2/026a/OT.01.3/SK/I/2017	SK. Standar Pelayanan Peradilan	27 Januari 2017
65	W20-A2/027/Pl.01/SK/I/2017	SK. Penghuni Rumah Dinas	27 Januari 2017
66	W20-A2/027a/Ps.00/SK/I/2017	SK. Penunjukan Penanganan Berkantor Kepentingan di Luar PA Wtp	27 Januari 2017
67	W20-A2/028/HK.05/SK/I/2017	SK. Susunan Panitera Pengganti	31 Januari 2017
68	W20-A2/028a/HM.001/SK/I/2017	SK. Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat	31 Januari 2017
69	W20-A2/029/HK.05/SK/I/2017	SK. Susunan Majelis Hakim	31 Januari 2017
70	W20-	SK. Pengawas Bidang	31 Januari 2017

	A2/030/PS.00/SK/I/2017		
71	W20-A2/030a/Kp.00.2/SK/I/2017	SK. Pemberhentian Tenaga Sopir	31 Januari 2017
72	W20-A2/031/Hk.05/SK/I/2017	SK. Hakim Mediator	31 Januari 2017
73	W20-A2/031a/OT.01/SK/II/2017	SK. Tim Reviu SAKIP	02 Pebruari 2017
74	W20-A2/032/HK.05/SK/II/2017	SK. Penunjukan Tim Perumus Bedah Berkas Wil. V	21 Pebruari 2017
75	W20-A2/033/OT.01/SK/II/2017	SK. Susunan Pengurus IKAHI	21 Pebruari 2017
76	W20-A2/034/HK.05/SK/II/2017	SK. Susunan Majelis Hakim	27 Pebruari 2017
77	W20-A2/035/HK.05/SK/II/2017	SK.Susunan Panitera/Panitera Pengganti	27 Pebruari 2017
78	W20-A2/036/HK.05/SK/II/2017	SK. Petugas Sidang	27 Pebruari 2017
79	W20-A2/037/HK.05/SK/II/2017	SK. Kontrak Kerja PosBaKum	27 Pebruari 2017
80	W20-A2/038/HK.05/SK/II/2017	SK. Hakim Mediator	28 Pebruari 2017
81	W20-A2/039/KU.04/SK/II/2017	SK. Penunjukan Penghunian Rumah Dinas	28 Pebruari 2017
82	W20-A2/040/PL.04/SK/II/2017	SK. Pejabat Pengadaan	28 Pebruari 2017
83	W20-A2/041/Pl.00/SK/III/2017	SK. Penerima Barang	01 Maret 2017
84	W20-A2/041a/Kp.00.2/IV/2017	SK. Pengangkatan Purnabakti, Satpam (Security) dan Sopir PA Watampone Tahun 2017	03 April 2017
85	W20-A2/041b/KU.00/IV/2017	SK. Penyusunan Laporan Keuangan	03 April 2017
86	W20-A2/042/Kp.00.2/SK/IV/2017	SK Honor DIPA	03 April 2017
87	W20-A2/042a/KU.00/SK/IV/2017	SK. Laporan Keuangan	04 September 2017
88	W20-A2/042b/OT.01.3/SK/IX/2017	SK. Pengelola IT	04 September 2017
89	W20-A2/043/Hk.05/SK/IX/2017	SK. Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu	12 September 2017
90	W20-A2/043a/Kp.01.2/SK/IX/2017	SK. Petugas Daftar Hadir	18 September 2017
91	W20-A2/044/Hk.05/SK/IX/2017	SK. Susunan Majelis Hakim	19 September 2017
92	W20-A2/044a/Kp.04.6/SK/IX/2017	SK. Baperjakat	19 September 2017
93	W20-A2/045/HK.05/SK/IX/2017	SK. Mediator	19 September 2017
94	W20-A2/045a/HK.05/SK/IX/2017	SK. Maklumat Pelayanan	19 September 2017

95	W20-A2/046/HK.05/SK/IX/2017	SK. Penunjukan Panitera Pengganti	19 September 2017
96	W20-A2/046a/Ps.005/SK/IX/2017	SK. Pengawas Bidang	19 September 2017
97	W20-A2/47/OT.01.3/SK/IX/2017	SK. Penunjukan Meja Informasi	22 September 2017
98	W20-A2/047a/Kp.01.2/SK/IX/2017	SK. Uraian Tugas	22 September 2017
99	W20-A2/048/PP.01.1/SK/IX/2017	SK. Penunjukan Sebagai Mentor pada Diklat Pim III Angkatan IX 2017	22 September 2017
100	W20-A2/048a/HK.05/SK/X/2017	SK. Radius	02 Oktober 2017
101	W20-A2/050/OT.01.3/SK/X/2017	SK. Tim Penyusunan Laporan Keuangan	02 Oktober 2017
102	W20-A2/050a/HM.00/SK/X/2017	SK. Humas	02 Oktober 2017
103	W20-A2/059/HM.00/SK/X/2017	SK. Tim Kerja SITATAN	02 Oktober 2017
104	W20-A2/060/HM.00/SK/X/2017	SK. Penetapan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	09 Oktober 2017
105	W20-A2/060a/HK.05/SK/X/2017	SK. Panjar Biaya Perkara	09 Oktober 2017
106	W20-A2/063/KU.04/SK/IX/2017	SK. Penghuni Rumah Dinas	23 Nopember 2017
107	W20-A2/064/PL.04/SK/IX/2017	SK. Roda Dua dan Roda Empat	23 Nopember 2017
108	W20-A2/065/PL.04/SK/XI/2017	SK. Pemegang Laptop	23 Nopember 2017
109	W20-A2/066/HK.05/SK/XI/2017	SK. Panjar Biaya Perkara	23 Nopember 2017
110	W20-A2/067/HK.05/SK/XI/2017	SK. Radius	23 Nopember 2017
111	W20-A2/068/HK.05/SK/XI/2017	SK. Petugas Meja I, II, III	23 Nopember 2017
112	W20-A2/069/HK.05/SK/XI/2017	SK. Kasir	23 Nopember 2017
113	W20-A2/070/HK.05/SK/XI/2017	SK. Penerima Perkara	23 Nopember 2017
114	W20-A2/071/HK.05/SK/XI/2017	SK. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	23 Nopember 2017
115	W20-A2/072/HK.05/SK/XI/2017	SK. Standar Layanan Informasi	23 Nopember 2017
116	W20-A2/073/HK.05/SK/XI/2017	SK. Jenis Informasi Pengadilan	23 Nopember 2017
117	W20-A2/074/HK.05/SK/XI/2017	SK. Penggunaan Ruang dan Perlengkapan PosBaKum	23 Nopember 2017
118	W20-A2/075/HK.05/SK/XI/2017	SK. Melaksanakan Sidang di Luar Gedung	23 Nopember 2017
119	W20-	SK. Melaksanakan Sidang di Lokasi	23 Nopember

	A2/076/HK.05/SK/XI/2017	Telah Ditentukan	2017
120	W20- A2/077/HK.05/SK/XI/2017	SK. Penunjukan Majelis Hakim	23 Nopember 2017
121	W20- A2/078/HK.05/SK/XI/2017	SK. Perlengkapan Persidangan	23 Nopember 2017
122	W20- A2/079/HK.05/SK/XI/2017	SK. Pemakaian Antrian Sidang	23 Nopember 2017
123	W20- A2/080/HK.05/SK/XI/2017	SK. Penerimaan Bukti Setiap Penyerahan Dokumen di Pengadilan	23 Nopember 2017
124	W20- A2/081/HK.05/SK/XI/2017	SK. Tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	23 Nopember 2017
125	W20- A2/082/HK.05/SK/XI/2017	SK. Tentang Pengiriman Petikan	23 Nopember 2017
126	W20- A2/083/HK.05/SK/XI/2017	SK. Tentang Penunjukan Petugas Pengaduan	23 Nopember 2017
127	W20- A2/084/HK.05/SK/XI/2017	SK. SOP Pengaduan	23 Nopember 2017
128	W20- A2/085/HK.05/SK/XI/2017	SK. Penunjukan yang Menangani Pengaduan	23 Nopember 2017
129	W20- A2/086/HK.05/SK/XI/2017	SK. Tentang Penunjukan Pengelola ATK Perkara	23 Nopember 2017
130	W20- A2/087/HK.05/SK/XI/2017	SK. Tentang ATK	23 Nopember 2017
131	W20- A2/088/HK.05/SK/XI/2017	SK. Penunjukan Petugas Keuangan Perkara	23 Nopember 2017
132	W20- A2/089/OT.01.2/SK/XII/2017	SK. Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan 2017	12 Desember 2017
133	W20- A2/090/OT.01.2/SK/XII/2017	SK. Penunjukan Tim Penyusunan LKJIP 2017	12 Desember 2017